

**KEPENTINGAN INDONESIA MENJALIN KERJASAMA
DENGAN KOREA SELATAN DI BIDANG *E - GOVERNMENT***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

MELANIA RAHMADHINA ARIYANDI

07041381924181

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Kepentingan Indonesia Menjalin Keerjasam Dengan Korea Selatan di Bidang
*E-Goverment***

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

Melania Rahmadhina

07041381924181

Pembimbing I

1. Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
NIP. 198708192019031006

Tanda Tangan

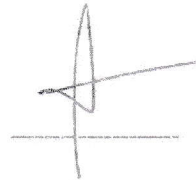


Tanggal

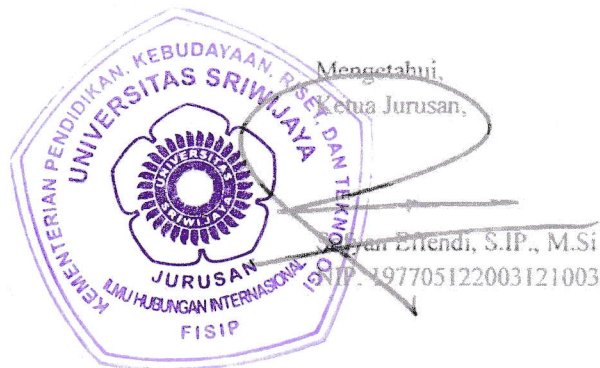
07/03/2023

Pembimbing II

2. Nurul Aulia, S.IP., MA
NIP. 199312222022032013



15/03/2023



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
"Kepentingan Indonesia Menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di Bidang
E-Government"

Skripsi
Oleh :
Melania Rahmadhina Ariyandi
07041381924181

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal Kamis, 11 Mei 2023

Pembimbing :

Pembimbing I
Dr. Muchammad Yustiann Yusa, S.S., M.Si
NIP. 198708192019031006

Pembimbing II
Nurul Aulia, S.IP., MA
NIP. 197705122003121003

Tanda Tangan

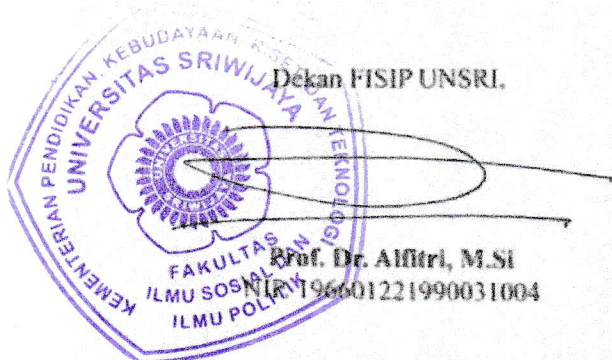
Penguji :

Penguji I
Gunnawan Lestari Elake, S.IP., MA
NIP. 198405182018031001

Penguji II
Maudy Noor Fadhli, S.Hub.Int., MA
NIDN. 8948340022

Tanda Tangan

Mengetahui



Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Persyaratan Otoritas

Saya yang bertaanda tangan di bawah ini :

Nama : Melania Rahmadhina
NIM : 07041381924181
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 9 Desember 1999
Program Study/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Kepentingan Indonesia Menjalin Kerjasama dengan Korea Selatan di Bidang E-Government

Menyatakan dengan sungguh :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan, yang di sajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di Universitas lain.

Demikianlah surat ini di buat dengan sebenar-benarnya , tanpa paksaan.

Palembang, 2 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Melania Rahmadhina Ariyadi
NIM. 07041381924181

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kepentingan Indonesia Menjalin Kerjasama dengan Korea Selatan di bidang *E-Government*. Korea Selatan merupakan salah negara yang berperan penting dalam hal teknologi khususnya dibidang *E-government*. Korea selatan dinilai mempunyai tingkat *E-government* yang baik di dunia menurut survei PBB. Dari hal tersebut indonesia mempunyai ketertarikan untuk kerjasama dengan Korea Selatan di naungi Kementerian PANRB dan MOHAGA untuk Korea Selatan. Kerjasama ini sudah dilengkapi dengan Mou dari tahun 2015 – 2018 lalu diperpanjang sampai dengan sekarang. Penelitian ini didukung dengan menggunakan konsep KJ. Hostli yaitu Kepentingan Nasional (*National Interest*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang dimana temuan – temuannya tidak dapat dilakukan dengan metode stastistik atau jenis hitungan lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur, seperti buku, jurnal, penelitian, laporan, dokumen, internet, dan berita. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan keamanan, kepentingan kesejahteraan, kepentingan otonomi dan kepentingan *prestigious*. Hasil dari kepentingan tersebut yang paling terlihat dari adanya kepentingan tersebut adalah kepentingan otonomi yang dimana bentuk kerjasama yang dihasilkannya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 mengenai SPBE.

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
NIP. 198708192019031006

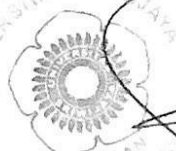
Pembimbing II



Nurul Aulia, S.IP., MA
NIP. 197705122003121003

Palembang, 24 Mei 2023

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

ABSTRACT

This study aims to describe Indonesia's interests in establishing cooperation with South Korea in the field of E-Government. South Korea is a country that plays an important role in terms of technology, especially in the field of E-government. South Korea is considered to have the best level of e-government in the world according to a UN survey. From this, Indonesia has an interest in cooperating with South Korea under the auspices of the PANRB Ministry and MOHAGA for South Korea. This collaboration has been completed with Mou from 2015 - 2018 and then extended until now. This research is supported by using the KJ.Hostli concept, namely the National Interest. The research method used is a descriptive method where the findings cannot be carried out by statistical methods or other types of calculations. This research uses secondary data obtained from literature, such as books, journals, research, reports, documents, internet, and news. The results of this study indicate that there are five interests, both directly and indirectly, namely economic interests, security interests, welfare interests, autonomy interests and prestigious interests. The result of this interest that is most visible from the existence of this interest is the interest of autonomy, which is the form of cooperation that results from Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE.

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
NIP. 198708192019031006

Pembimbing II



Nurul Aulia, S.IP., MA
NIP. 197705122003121003

Palembang, 24 Mei 2023

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP.197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya juga lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Kepentingan Indonesia Menjalin Kerjasama dengan Korea Selatan di Bidang *E-Government*”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Pada kesempatan kali ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan skripsi ini, terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muchammas Yustian Yusa, S.S., M.SI selaku pembimbing saya yang telah membantu dalam mengarahkan pembuatan skripsi penulis
2. Ibu Nurul Aulis, S.IP., MA juga selaku pembimbing yang telah telah membantu dan mengarahkan pembuatan skripsi.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. Selaku ketua jurusan Ilmu Internasional
4. Para admin Ilmu Hubungan Internasional
5. Ibu Lisye Gusniawati selaku ibu penulis membantu dalam meningkatkan financial penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Fidhel Hakima, Muhammad Fariz NurFaizi, Gina Pebriyanti, selaku teman penulis yang sudah membantu dalam menguatkan mental penulis.
7. Saya sendiri sebagai penulis yang sudah kuat dan bertaham sampai dengan sekarang bisa menyelesaikan skripsi ini

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Manfaat Teoritis	4
1.4.2. Manfaat Praktis	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Penelitian Terdahulu.....	5
2.2. Kerangka Teori.....	8
2.2.1. Kepentingan Nasional.....	8
2.3. Kerangka Pemikiran	12
BAB III. METODE PENELITIAN	13
3.1. Desain Penelitian	13
3.2. Definisi Konsep	13
3.3. <i>Focus</i> Penelitian	13
3.4. Unit Analisis.....	17

3.5. Jenis Sumber Data	17
3.6. Teknik Pengumpulan Data	18
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	18
3.8. Analisis Data	18
BAB IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	20
4.1. Sejarah Kerjasama Indonesia-Korea Selatan.....	20
4.2. Perkembangan <i>E-Government</i> di Era Joko Widodo.....	23
4.3. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di Bidang <i>E-Government</i>	28
4.4. Roadmap Pengembangan <i>E-Government</i> Tahun 2016-2019	31
BAB V. KEPENTINGAN INDONESIA MENJALIN KERJASAMA DENGAN KOREA SELATAN DI BIDANG <i>E-GOVERNMENT</i>.....	34
5.1. Kepentingan Otonomi	34
5.1.1. Pembuatan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	34
5.2. Kepentingan Kesejahteraan	37
5.2.1. Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	37
5.2.2. Pembuatan Aplikasi SP4N LAPOR!	39
5.3. Kepentingan <i>Prestigious</i>	42
5.4. Kepentingan Ekonomi (<i>Economy</i>).....	45
5.4.1. Penerapan <i>E-Government</i> di Indonesia sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi.....	45
5.5. Kepentingan Keamanan (<i>Security</i>).....	48
5.5.1. Pengembangan <i>Cyber Security Indonesia</i> bersama KOICA	48
5.5.2. Pembangunan Gedung <i>Cyber Security</i> di ITB bersama KOICA	49
5.5.3. <i>E-learning</i>	52
5.5.4. <i>Cyber Wellness</i>	53

5.5.5. ASEAN <i>Cyber Kids</i>	54
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	
6.1. Kesimpulan.....	
6.2. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2.2. Kerangka Pemikiran	12
Tabel 3.1. <i>Focus</i> Penelitian	14

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Rapat Penetapan Inisiatif Roadmap e-gov 2016-2019	31
Gambar 4.2. Rapat Penetapan Inisiatif Roadmap e-gov 2016-2019	32
Gambar 4.3. Rapat Penetapan Inisiatif Roadmap e-gov 2016-2019	32
Gambar 5.1. Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	38
Gambar 5.2. Mekanisme Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR	41
Gambar 5.3. Data EDGI	43
Gambar 5.4. <i>UN Government Knowledge Based</i>	44
Gambar 5.5. <i>UN Government Knowledge Based 2020</i>	45
Gambar 5.6. Gedung <i>Cyber</i> KOICA-ITB R&B Center	50
Gambar 5.7. Sosialisasi guru SMA kota Bandung di ruang Multipurpose Hall gedung Cyber Security Centerr	52
Gambar 5.8. Para peserta guru SMA	52
Gambar 5.9. Paparan tentang <i>e-learning</i>	53
Gambar 5.10 Peserta Negara ASEAN	53
Gambar 5.11. Kegiatan <i>Cyber Wellness</i>	54
Gambar 5.12. Kompetisi ASEAN <i>Cyber Kids</i>	54
Gambar 5.13. Registrasi Negara Phillipine	55

DAFTAR SINGKATAN

EGCC	: E-Government Cooperation Center
EDGI	: E-Government Development Index
KEMENPANRB	: Kementerian Perdayagunaan dan Aparatur Negara
MoU	: Memorandum of understanding
IT	: Information and Technology
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
MoM	: Minute of Meeting
PerPres	: Peraturan Presiden
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
MOIS	: Ministry Of The Interior And Safety
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPTIK	: Badan Pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Komunikasi SP4N LAPOR	: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)
UNDP	: United Nations Development Programme
TII	: Telecommunication Index
HCI	: Human Capital Index
ODGI	: Open Government Data Index
CPI	: Corruption Perception Index
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KKN	: Kolusi Korupsi dan Nepotisme
LPSE	: Layanan Pemerintah Secara Elektronik

LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah	
SPSE	: Sistem Pengaduan Secara Elektronik
KOICA	: Korean Internasional Cooperation Agency
ITB	: Institut Teknologi Bandung
SDM	: Sumber Daya Manusia
OSI	: Online Index Service
CIO	: Cief Information Officer
KITC	: Information Technology Consulting

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu peluang baru bagi pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi penyelenggaraan sistem pemerintahan bisa lebih mudah dan mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan, yang kemudian dapat mempengaruhi terwujudnya perbaikan pelayanan pemerintah. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikenal sebagai *Electronic Government* atau *E-Government*. Di era Globalisasi ini *E-Government* sudah menjadi hal wajib untuk digunakan pasalnya banyak aktivitas yang dilakukan menggunakan internet dan bisa mempermudah kegiatan administrasi yang dilakukan antar masyarakat dan pemerintah. *E-Government* merupakan suatu sistem teknologi dan informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan layanan pemerintah. (Purnamasari, 2019). Secara umum *E-government* dapat didefinisikan sebagai penerapan produk – produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi pemerintah.

Adapun jenis jenis layanan e-government terdiri dari ;

1. *Government to Citizen* merupakan pelayanan penyebaran informasi terhadap masyarakat,
2. *Government to Business* meliputi berbagai layanan antar pemerintah dengan komunitas bisnis, termasuk penyebaran kebijakan peringatana, aturan dan undang – undang.

3. *Government to Employed* meliputi layanan yang hanya mencakup pegawai pemerintah seperti seperti syarakat pelatihan dan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) yang meningkatkan fungsi birokrasi dari hari ke hari dan hubungan dengan warfa,
4. *Government to Government* di bagi menjadi menjadi dua yaitu tingkat local atau domestic dan tingkat internasional layanana ini merupakan suatu transaksi anatar pemerintah dan dapat dipergunakan sebagai suatu layanana diplomasi internasional.
(Rina, sulandari, & lituhayu, 2018)

Di Indonesia Implementasi pengembangan e-government di Indonesia menghadapi banyak tantangan baik secara geografi, ekonomi, teknologi, politik dan budaya. Dalam proses implementasinya, terlihat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa implementasi e-government masih lambat dan tidak signifikan, dengan biaya negara yang tinggi. Perbedaan antar daerah dan duplikasi database membuat data produk pemerintah kurang dapat diandalkan. Di Indonesia, implementasi e-government masih berada di tengah-tengah, sehingga konsep dan strategi implementasi e-government perlu diperbaiki. Implementasi e-governance merupakan salah satu program prioritas reformasi birokrasi yang merupakan upaya nyata dari Kementerian PAN dan RB yang mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Joko Widodo dalam hal ini untuk membangun *good governance*. EGCC (*E-Government Cooperation Center*) memiliki peran dan misi yang sangat strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerjasama, berbagi pengalaman dan informasi serta membahas tahapan implementasi *e-government*. Pemerintah Indonesia akan sangat diuntungkan dengan adanya jokowi untuk mempercepat adopsi e-government di Indonesia.

Didirikan pada Maret 2015, pusat kerjasama ini mengembangkan rencana aksi e-government, perencanaan, standarisasi dokumen elektronik dan metode evaluasi e-government untuk mengukur indeks pengembangan e-government Indonesia.

Menurut Lee Young Suk dari Ministry of interior Korea Selatan menyatakan bahwa ada 3 fase sejarah *E-Government* di Korea Selatan. Fase pertama di mulai pada tahun 1980 hingga 1990, pada masa itu rencana pelaksanaan *E-Government* sudah akan dilakukan ditambah akses internet yang sudah terbangun dengan baik. Fase kedua terjadi akhir tahun 1990 an hingga tahun 2008 , Pemerintah Korea mulai mengembangkan sistem dan sumber daya manusia dan dalam fase ini website resmi telah diluncurkan . Dan Lee menambahkan fase ketiga terjadi pada tahun 2009 sampai sekarang pemerintah Korea Selatan mulai mendorong keterkaitan *E-Government* dengan sistem yang lain , sekitar 20 ribu sistem *E-Government* yang sudah diciptakan untuk pelayanan publik. (Korea perlu 20 Tahun Lebih bangun E-GoV, 2016) . Adapun Indonesia-Korea Selatan menjalin Kerjasama dalam hal E-Government kedua negara. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut membuat penulis melakukan analisis lebih lanjut mengenai kepentingan Indonesia menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang E-Government.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti berdasarkan paparan diatas ialah “ bagaimana kepentingan Indonesia kerjasama dengan korea Selatan di bidang *E-Government*?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat dan menganalisis bagaimana kepentingan dari Indonesia terhadap kerjasama dengan Korea Selatan dalam pengembangan *E – Government* di Indonesia , dan melihat bagaimana dampak dari adanya *E- government* di indonesia .

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan baik untuk data – data dan informasi yang jelas bagi para akademisi program studi Ilmu Hubungan Internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menjadi sarana bagi akademis dan para peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan inspirasi dalam penelitian terkait kepentingan Indonesia dalam kerjasama dengan Korea Selatan di bidang *E – Government*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat untuk atau instansi terkait sebagai sarana untuk menambah informasi serta menjadi pertimbangan dalam menentukan Kepentingan Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan Korea Selatan dibidang *E-Government*.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2022, januari 07). *apa itu SPBE di pemerintahan*. Diambil kembali dari Urgensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: diskominfo.kedirikab.go.id
- Aji, F. B. (2016, Juni 21). *E-Government Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi*. Diambil kembali dari panggungharjo.desa.id.
- Akbar, N. (2018, maret 28). *Pemerintah Kaji Sistem Dana Pensiun Korea Selatan*. Diambil kembali dari Info Publik: infopublik.com.
- Anugrah ayu Sedari. (2019, agustus 08). mengenal jenis penelitian deskriptif kualitatif pada sebuah tulisan ilmiah. hal. 1.
- Cawindu, I. (2016, januari 01). *Pemerintah Selesaikan Peta Jalan e-Government 2016-2019 yang bernuansa nawacita dengan menyerap Inisiatif* . hal. 1.
- Daniel S. Paap. (1998). *Comporary In ternasional Relation : A Framework for Understanding Second Editions*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Daniel S. Paap. (1998). *Contemporary International Relation : A Framework for Understanding Second Editions*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Dokumen dokumen MOU PANRB dengan beberapa kementerian/lembaga, universitas dan beberapa negara sahabat*. (2017). Diambil kembali dari perpus.menpan.go.id
- Faedlulloh , d., Yulianto, & karmilasari, v. (t.thn.). reformasi dan birokrasi periode kedua : mendorong reformasi struktural dan pola pikir. *Bureaucratic reform in the second Period ; Promoting Agenda for Structural Reform Mindset*, 9.
- Fernandez, M. N. (2019, september 24). *Indonesia Pelajari pemerintahan Berbasis Elektronik Di Korea* . Diambil kembali dari Kabar24: kabar24.bisnis.com
- Fitriani, F. F. (2022, agustus 30). *jelang %0 tahun hubungan bilateral RI Korsel : sejarah hingga moment penting*. hal. 1.
- H.J Morgentau . (t.thn.). *In defense Of The National Interest: A Critical Examination if American Foreign policy* ,. New York : University Press of America 1951.
- H. P. (2018, Desember 26). *Dua Tahun Perpres SPBE Setiap Instansi harus Gunakan aplikasi Umum*. Diambil kembali dari Panrb: menpan.go.id.

- Idtesis.com*. (2012, januari 04). Diambil kembali dari <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>
- Ismail, R. (2019). *Kerjasama E- government Indonesia - Korea Selatan Terhadap Peningkatan Pelayanan IT Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*.
- J. Lexy Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- K.J Hostli. (1996). *International Politics A Framework for Analysis*. New York .
- Katharina, R. (2009). *E-Government dan ICT Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Pusat Pekajian Pengelolaan Data dan Information (P3DD)*, 4 Pages.
- Korea perlu 20 Tahun Lebih bangun E-GoV*. (2016, desember 07). Diambil kembali dari Panrb (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi): menpan.go.id
- Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia* . (1973, September 13).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*. (2020, oktober 09). Diambil kembali dari Hasil survei PBB indonesia naik peringkat: kominfo.go.id
- Kencana, M. B. (2019, 24 September). *Korea Selatan Latih e-Government PNS Indonesia*. Diambil kembali dari liputan6.com
- I. m. (2021, 29 November). *Kominfo Indonesia teknis*. Diambil kembali dari Pengguna SP\$N LAPOR!: aptika.kominfo.go.id
- Lutfia chandra A.M , M. (2012). *Defining National Interest*.
- Mekarise A.A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan data Pada Penelitian Kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal ilmiah Kesehatan Masyarakat.*, 145 - 155.
- Purnamasari, E. (2019). *Kerjasama Indonesia - Korea Selatan Dalam Bidang E-Government*. 14.
- Purnamasari, d. m. (2019, september 24). *Indonesia Ingin Adopsi Sistem e-people Korea Selatan di SP\$N LAPOR!*. Diambil kembali dari Kompas.com: amp.kompas.com
- PANRB, H. (2018, oktober 14). *Atasi Inefisiensi Anggaran, Perpres ditekan E-Government ditekan Presiden*. Diambil kembali dari menpan.go.id.
- Penggunaan SP4N LAPOR! Tingkatan Pelayanan Publik Berkualitas*. (2021, november 19). Diambil kembali dari Kominfo Indonesia terkoneksi: aptika.komunfo.go.id.

- PPID. (2017). *Dokumen dokumen MOU KEMENPANRB dengan beberapa kementerian/lembaga ,universitas dan negara sahabat*. Diambil kembali dari perpus menpan: perpus.menpan.go.id.
- Rahayu, R. B. (2018, september senin). *hasilkan Sejumlah capaian Indonesia perpanjang Kerjasama e-Gov*. Diambil kembali dari Okezone.com: nasional.okezone.com
- Rahman, A. F. (2016, desember 19). *Kominfo Latih Seribu PNS agar melek TIK*. Diambil kembali dari detiknet: inet.detik.com
- Sari, K. D. (2012). *Implementasi E-Government Sistem Dalam Upaya Peningkatan Clean Good Government Di Indonesia*. 19.
- Simangunsong, J. (2010). *Pengembangan E-Government Di Indonesia*. 25.
- (2018). *Pengembangan digital Government*. Jakarta: kementerian PPn/BAPPENAS.
- S.Kom., M.Kom. .IPM, D. Y. (2017). *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan E-Government Di Provinsi Sumatera* . Padang: Pemerintah
- SP\$N LAPOR. (2022, April 2022). Diambil kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia: pa-jakartapusat.go.id
- Tohirin, A. M. (2014, Desember senin, 22). *Koreab's Experiences Learning Good government dan E- government*. hal. 1.
- WAndrean, f. W. (2019). *E- Government Bisa Meminimalisir Korupsi*. Diambil kembali dari indonesiabaik.com